

# PELANGI ILMU

JURNAL BERKALA FORUM MAHASISWA PASCASARJANA GORONTALO

VOL. 2 NO. 4 MARET 2009

**EDISI KHUSUS**

ISSN 1979-5262



## DAFTAR ISI

ISSN 1979-5262  
EDISI KHUSUS  
Volume 2 No. 4 2009

### Pelindung:

Ketua Forum Mahasiswa Pasca  
Sarjana  
Gorontalo di Yogyakarta

### Ketua Penyunting:

Fence M. Wantu, SH, MH.

### Wakil Ketua Penyunting:

Halim K. Malik, S.Pd

### Penyunting Ahli/Dewan Penyunting

Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si

Prof. Wely Pangayow, M.Si, Ph.D

Dr. Fadliah, M.Si

### Penyunting Pelaksana:

Dra. Mery Balango, M.Hum

Drs. Ismail Djakaria, M.Si

Farid Th. Musa, S.Sos, M.Si

Abubakar Sidik Katili, S.Pd, M.Sc

### Desain Cover:

Amirudin Y. Dako, ST

### Manajemen Pengembangan/Keuangan

Yowan Tamu, S.Ag

Rusni Podungge, S.Pd

### Penerbit:

Pena Persada

Desktop and Publishing

Y o g y a k a r t a

Daftar Is .....	i
Editoriali.....	ii

<i>Multicore Processor</i> Ditinjau Dari Segi Arsitektur Komputer Oleh: <b>Rahmat Deddy Rianto Dako</b> .....	1
Deskripsi Reduplikasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Gorontalo Oleh: <b>Indri Wirahmi Bay</b> .....	13
Menuju Demokrasi Pendidikan (Upaya Menuju Konstruksi Ulang Sistem Pembelajaran di Sekolah) Oleh: <b>Said Subhan Posangi</b> .....	25
Pendidikan IPA di Sekolah Dasar dan Perkembangannya Oleh: <b>Citron S. Payu</b> ...	36
Remaja dan Agresivitas (Suatu Tinjauan Teoretis Perilaku Kekerasan Pada Mahasiswa) Oleh: <b>Irvan Usman</b> .....	46
The Hard Boiled Detective Story and Its Formula Reflected In Sydney Sheldon's the Naked Face and Robert Ludlum's the Bourne Supremacy Oleh: <b>Rusni Podungge</b> .....	55
The Frontier Wilderness as Reflected in Cooper's "The Pathfinder" oleh: <b>Farid Muhamad</b> .....	69
The Military And Democratization On Thailand Oleh: <b>Sastro M. Wantu</b> .....	81
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Oleh: <b>Udin Hamim</b> .....	89
Reformasi Arah Kebijakan Hukum Perdata Formil Dalam Kekuasaan Kehakiman Oleh: <b>Fence M. Wantu</b> .....	102
Feodalisme dan Konsepsi Hegemoni dalam Kultur Sosial (Sebuah Kajian Komparatif) Oleh: <b>Usman Pakaya</b> .....	112
Reformasi Kebijakan Fiskal Perekonomian Nasional dan Daerah Oleh: <b>Frahmawaty Bumulo</b> .....	121
Mitos dan Logos (Relasi Agama dan Moderenitas: Suatu Tinjauan Umum) Oleh: <b>Mohamad Paputungan</b> .....	129
Hinduisme di India dan Hinduisme di Indonesia ( <i>Studi Komparatif dalam Tinjauan Kepustakaan</i> ) Oleh: <b>Trisnowaty</b> <b>Tuahunse</b> .....	145
Manfaat Pelatihan dan Pengembangan Bagi Karyawan Hotel Oleh: <b>Radia Hafid</b> .....	156



## EDITORIAL

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT dan kerja keras dari segenap crew **Jurnal Pelangi Ilmu (JPI)**, Edisi Khusus bulan Maret tahun 2009 dapat hadir di hadapan para pembaca. Edisi Khusus bulan Maret 2009 ini hadir dalam rangka memperingati tepat 3 (tiga) tahun berdirinya **Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Gorontalo di Yogyakarta** dan hari Ulang Tahun Propinsi Gorontalo yang ke 9 (sembilan) yang dirayakan setiap bulan Februari.

Pengelola Jurnal Pelangi Ilmu (JPI) merasa mendapat kehormatan dengan diadakannya penerbitan Edisi Khusus ini, karena dengan ini keberadaan Jurnal Pelangi Ilmu (JPI) diterima oleh pembaca dan penulis yang didominasi oleh masyarakat akademik di lingkungan berbagai disiplin bidang ilmu yang menyebar di Propinsi Gorontalo.

Sajian Jurnal Pelangi Ilmu (JPI) Edisi Khusus ini, merupakan kumpulan artikel dari berbagai bidang ilmu yang terdiri dari 15 artikel. Artikel yang dimuat dalam jurnal kali ini terdiri dari enam (13) Jurnal lepas atau konseptual dan dua (2) judul jurnal hasil penelitian.

Tulisan untuk Edisi Khusus ini terdiri dari kajian-kajian pemikiran tentang Pendidikan, Ekonomi, Hukum, Politik, Komputer, Agama, Sejarah, Lingustik bahkan Kajian Amerika. Mengawali tulisan jurnal edisi khusus kali ini adalah artikel dari **Rahmat Deddy Rianto Dako** dengan topik "*Multicore Processor Ditinjau Dari Segi Arsitektur Komputer*", **Indri Wirahmi Bay** menyajikan "*Deskripsi Reduplikasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Gorontalo*", **Said Subhan Posangi** menulis tentang "*Menuju Demokrasi Pendidikan*", **Citron S. Payu** membahas "*Pendidikan IPA di Sekolah Dasar dan Perkembangannya*" dan **Irvan Usman** menulis *Remaja dan Agresivitas (Suatu Tinjauan Teoretis Perilaku Kekerasan Pada Mahasiswa)*. Selanjutnya **Rusni Podungge** menulis tentang "*The Hard Boiled Detective Story and Its Formula Reflected In Sydney Sheldon's the Naked Face and Robert Ludlum's the Bourne Supremacy*", **Farid Mohamad**, menulis tentang "*The Frontier Wilderness as Reflected in Cooper's 'The Pathfinder'*".

Selain tulisan-tulisan tersebut di atas, ada juga tulisan-tulisan yang menarik untuk dibaca antaranya ditulis oleh **Sastro M. Wantu** tentang "*The Military And Democratization on Thailand*". Selanjutnya **Udin Hamim** menulis tentang "*Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance*". **Fence M. Wantu** menulis tentang "*Reformasi Arah Kebijakan Hukum Perdata Formil Dalam Kekuasaan Kehakiman*", yang mengharapkan lahirnya peraturan hukum acara perdata yang merupakan produk hukum buatan ahli hukum Indonesia sendiri. **Usman Pakaya** "*Feodalisme dan Konsepsi Hegemoni dalam Kultur Sosial*" suatu kajian perbandingan Feodalisme

dan hegemoni yang merupakan merupakan fase pembangunan karakter (*character building*) pendominasian oleh manusia terhadap manusia lainnya, yang sama-sama memposisikan manusia sebagai objek penderita, yang membedakannya hanyalah era, dan bentuk pemodelan dominasi. Tulisan lain adalah "*Reformasi Kebijakan Fiskal Perekonomian Nasional dan Daerah* Oleh: **Frahmawaty Bumulo**" dan "*Mitos dan Logos*" Oleh: **Mohamad Paputungan**

Tulisan hasil penelitian dalam jurnal ini oleh: **Trisnowaty Tuahunse** "*Hinduisme di India dan Hinduisme di Indonesia*" suatu studi komparatif dalam tinjauan kepustakaan, dan **Radia Hafid** menyajikan hasil penelitian "*Manfaat Pelatihan dan Pengembangan Bagi Karyawan Hotel*"

Tiada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang sempurna dari kesalahan dan kekhilafan. Jika dalam melayani masyarakat akademik di lingkungan berbagai disiplin bidang ilmu melalui **Edisi Khusus** ini ada sikap dan pelayanan kami yang tidak memuaskan para penulis dan pembaca semua, sudah sepantasnyalah kami haturkan maaf yang sebesar-besarnya.

*Last but not least*, kami Pengelola Jurnal Pelangi Ilmu (JPI) memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Anggota Dewan Penyunting dan Penyunting Pelaksana JPI yang telah bekerja keras untuk terbitnya Jurnal Pelangi Ilmu (JPI) **Edisi Khusus Maret 2009** ini. Terakhir kepada semua penulis tentu kami juga haturkan terimakasih yang setulusnya atas kontribusi artikel yang telah dikirimkan ke JPI. Semoga ilmu yang telah disebarkan melalui JPI ini menjadi bagian dari amal shaleh para penulis semuanya. Amin.

Maret 2009

Redaksi



## Feodalisme dan Konsepsi Hegemoni dalam Kultur Sosial (Sebuah Kajian Komparatif)

Oleh: Usman Pakaya

### Abstract

*The aims of this writing is will explain from a lot of an actual complexity of feudalism and hegemony. The complexity that will recognize us how the existence of human in long life episode of the exploits history. Where violence and intimidation became a dark figure in both civilization, when hedonism passion became the reason which used to intimidate others as well.*

*In this writing also will elaborates the essential differentiations of both civilization model to avoid an ambiguity toward those concepts.*

**Key Words:** *Domination, People*

### Pendahuluan

Pada abad XIII, dikenal sebuah ideologi yang berkembang dan menjadi tradisi yang bertahan cukup lama dalam peradaban manusia, anatomi peradaban tersebut menempatkan satu golongan atau bangsa tertentu pada pengeksklusifan otoritas atas golongan lainnya yang kelas sosialnya berbeda dengan kelas yang mensubordinasinya. Pada kondisi demikian memposisikan pangkat, jabatan, stratifikasi dan segala hal yang bersifat hedonis duniawi sebagai atribut materialistis, sehingga berkesempatan untuk menekan secara radikal kaum atau golongan dibawahnya.

Tendensi logis ini terbaca secara jelas dengan maraknya konflik sosial yang terjadi pada dekade tersebut,

dimana ketika itu terjadi konfrontasi yang cukup mengemuka antara sang *lord* (tuan) dengan kelas pekerja atau eksplisitnya bisa dikatakan sebagai buruh kasar. Sistem hirarki yang merupakan prototipe pada peradaban tersebut, lebih mengedepankan keinginan sang *lord* dibandingkan dengan menyelamatkan hak-hak dari pekerja.

Cukup bisa dipahami, karena sang *lord*, merupakan sistem yang diagungkan dan dihormati pada waktu itu, dan dianggap sebagai kepanjangan tangan raja yang notabeneanya distigmakan sebagai pembawa pesan moral dari sang pencipta kepada makhluknya (*God Messenger*), sehingga apapun doktrin dari sang *lord*, itu berarti merupakan titah dari raja yang harus dijalani.

Otoritas besar yang dimiliki oleh sang lord tersebut, menjadikannya *untouchable* (tak tersentuh) oleh apapun, termasuk legalitas hukum, karena preskripsi sistem hukum adalah produk dari sang *lord*, jika tidak ingin dikatakan bahwa sistem hukum yang sesungguhnya pada masa itu adalah sang *lord* sendiri. Dengan demikian yang menentukan bersalah tidaknya seseorang, bukan berdasarkan pada regulasi rijid, seperti yang kita kenal selama ini, tetapi bergantung pada *policy* dari sang *lord*.

Elaborasi hermeneutik yang diurai barusan diterjemahkan sebagai, suatu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan kepada golongan atau bangsa tertentu, itu yang disebut sebagai feodalisme. Istilah feodalisme sendiri di ambil dari bahasa Latin '*feodum*', yang berarti fief (sistem kelas). Jadi interpretasi dari feodalisme secara harafiah berarti suatu masyarakat yang diatur berdasarkan sistem fief, dengan kekuasaan legal dan politis yang menyebar luas diantara orang-orang yang memiliki kekuasaan ekonomi (Fink, 2003: 17).

Secara fundamental sistem feodalisme akut yang terjadi pada waktu itu, tercipta karena gap ekonomi yang cukup signifikan antara kemapanan dan kebersahajaan, yang menempatkan sub-sub tersebut sebagai kerumitan berbagai dimensi subsisten yang terus sustain, bahkan sampai hari ini.

Euforia sosial tersebut, mendorong seseorang ataupun kelompok tertentu untuk bersikap otoriter dan otonom terhadap kelompok lainnya yang memiliki keterbatasan, sehingga kelompok yang disubordinasi tersebut tidak mampu melakukan apa-apa, selain pasrah saja. Ketika ketidakmampuan untuk melakukan protes tersebut terus saja dibiarkan, akan berimplikasi pada defaitisme absurd yang senantiasa menjadi bulan-bulanan sistem, dan manfaatnya lebih menguntungkan kepentingan sang penguasa.

Jika sesuatu pernah terjadi maka ia akan dengan mudah menjadi adat-istiadat. Jadi siapapun yang pernah berhasil melakukan tindakan tertentu, dengan demikian akan mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai hak untuk mengulangi tindakan itu lagi (Fink, 2003:23). Dengan kata lain bahwa peradaban pada waktu itu, tidaklah mampu mendobrak sistem yang tengah berlangsung dikarenakan terbentur oleh tradisi yang mengebiri sistem lain secara gradual dan senantiasa oskilatif, yang nantinya memandu sistem tersebut kearah konsepsi yang jauh lebih elegan, yaitu legalitas hukum.

Konkritnya bisa diulas dalam deskripsi yang menggambarkan, betapa otoriter dan zalimnya penguasa di kala itu. Dimana sang *lord* yang logikanya hanyalah sebuah sistem kecil karena secara hirarki masih ada sistem yang jauh lebih besar di atasnya

yaitu raja, tetapi mampu menciptakan otoritas dan kebijakan publik sendiri di dalam kendalinya. Ketika misalnya, sang *lord* mewajibkan pekerjanya bekerja terus menerus sepanjang waktu, tanpa adanya standarisasi jam kerja, upah yang minim, dan juga tidak adanya jaminan keselamatan. Serta yang parahnya disini adalah, sang *lord* menuntut kualitas maksimal dari output yang dihasilkan. Bagaimana mungkin menghasilkan produk yang *valuable*? sementara pelayanannya tidak cukup linear dengan ekspektasi kenyamanan terhadap pekerja, padahal kedua hal tersebut harusnya saling interdependen dan aksesibel.

Cerita lainnya mengenai kolonisasi *quo vadis* sang penguasa adalah, petani yang memiliki lahan sendiri pada masa itu, diharuskan untuk menyerahkan hasil buminya kepada sang penguasa, untuk dibeli dengan harga rendah. Bahkan juga seringkali hasil buminya diambil secara paksa untuk kepentingan sang penguasa. Sungguh merupakan potret buram jahiliah yang bermetamorfosa dalam sebuah matra baru yang jauh lebih ekstrim dari peradaban sebelumnya.

Selanjutnya, apa hubungan antara feodalisme dan hegemoni seperti yang menjadi tema kajian dalam tulisan ini? Eksistensi paham ini mulai mengemuka pada abad XX, dan menjadi penting untuk dibahas, karena sintesa ini menyorot sebuah

peradaban manusia, seperti halnya feodalisme.

Paham ini dibangun diatas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka (Sugiono, 2006: 31). Inilah yang dimaksudkan oleh Gramsci sebagai hegemoni adalah menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual (Gramsci, 1971: 57). Teori hegemoni ini sendiri merupakan pengembangan teori-teori Marxis sebelumnya yang pernah ada, yang prinsipnya sama-sama meneropong mengenai ketidaksinkronan relasional antara proletariat dan sang penguasa.

Ciri anakronistik yang inheren masih terus mewarnai peradaban manusia di abad ini, sama halnya dengan yang terjadi di era feodal, bedanya mungkin tampilan yang agak sedikit santun dengan bahasa yang agak eksklusif, yaitu hegemoni. Dahulunya yang dikedepankan adalah pendekatan koersi yang memarjinalkan hak-hak rakyat kecil. Sekarang model pendekatannya lebih kepada dominasi diplomasi, walau terkadang tetap mengimitasi produk militan rezim sebelumnya di era feodalisme.

Otonomi daerah yang sebelumnya digulirkan untuk menepis karakter buruk pemodelan desentralisasi yang pernah sangat bertahta. Dimana ketika otonomi diejewantahkan dalam bentuk transfer devolusi kewenangan sentrifugal kepada pemerintah daerah agar terjadinya pemerataan pembangunan, ternyata malah menciptakan kerajaan-kerajaan kecil dengan kekuasaan yang begitu besar di berbagai daerah.

Kita di sini tidak akan membahas masalah otonomi daerah, itu hanyalah contoh kecil dari banyak kasus tentang hegemoni. Ranah hegemoni dalam cakupan yang lebih luas lagi menghadirkan satu fenomena yang cukup spektakuler, bagaimana tidak, hegemoni belakangan ini tidak hanya melulu pada dekonsentrasi kewenangan internal disebuah daerah atau wilayah, tetapi lebih dari itu hegemoni telah melintasi benua dengan berbagai dimensi yang dapat dijadikan alat hegemoni.

Bisa kita lihat dominasi yang besar dari sebuah negara yang memiliki kekuatan super terhadap negara lainnya, ketika kekuatan militer tidak menjadi satu-satunya patron dalam mengintimidasi, tetapi juga ada satu kekuatan lainnya yang sedikit lebih *innocent*, yaitu diplomasi.

Diplomasi bisa dicontohkan, ketika satu negara mengklaim dirinya sebagai negara yang memiliki kekuatan politik dan perekonomian yang mempuni secara global, dapat

dengan mudahnya mengintervensi kebijakan dalam negeri, negara lainnya, bahkan demi alasan kepentingannya, tidak jarang negara tersebut merusak tatanan politik dan ekonomi negara lain.

Tidak itu saja, isu liberasi global yang dihembus, membuka peluang penderivasian kolonisasi dalam model caplok yang lebih transparan dari sebelumnya, ketika revitalisasi dan rekonstruksi disederhanakan sebagai instrumen mereparasi kestabilan makro politik dan sendi-sendi perekonomian dalam menghadapi kompetisi global.

Dengan kekuatan hegemoni yang begitu besar, membuat negara-negara super tersebut semakin eksis melenggang dengan kebijakan luar negeri yang mereka buat sendiri. Sementara negara-negara lainnya yang memiliki kekuatan yang relatif lebih kecil tidak dapat memfalsifikasi, karena takut akan menjadi sasaran berikutnya, atau malah mungkin juga sedang merencanakan mengafirmasikan kekuatan aglomerasi dominasi lainnya, pada negara yang lebih kecil dibawahnya.

Ambigu antara feodalisme dan hegemoni, terkadang menghadirkan kekeliruan dalam menerjemahkan. Bipolaritas yang berkembang di tengah publik kita, bahwa secara epistimologi feodalisme jauh lebih frontal dalam pemanifestasian, dibandingkan dengan hegemoni. Karena di dalam ranah ini, dibangunnya satu sistem yang



mendewakan satu golongan sosial tertentu yang secara sadar mengobjekkan manusia secara radikal, dalam bentuk intimidasi, diskriminasi, serta pencabutan hak-hak yang melekat pada individu manusia tersebut.

Sedangkan hegemoni, pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan feodalisme, dimana dikonstruksinya pendominasian implisit satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan media yang diplomatis, dan sedikit lebih eksklusif dibandingkan dengan yang pernah terjadi pada sistem feodal.

Melihat kajian ontologis mengenai feodalisme dan hegemoni, serta bagaimana eksistensi matra tersebut dikomparasikan dalam paradigma sosial, akan dijabarkan dalam uraian pembahasan berikut ini:

### **Feodalisme dan Dimensi Sosial**

Adagium ada yang kaya, berarti ada pula yang miskin, rasanya merupakan artikulasi yang tepat, dalam membahasakan mengapa sistem feodalisme pernah sangat berkuasa di bumi ini. Jarak yang begitu kentara antara kaum borjuis dan kaum terpinggir, menciptakan kelas-kelas sosial ditengah masyarakat. Nah kelas-kelas inilah yang mendorong terbentuknya satu paham pengkultusan terhadap aliansi atau golongan yang memiliki materi yang berlebihan, sehingga memungkinkan memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, yang dapat

dimanfaatkan untuk menekan secara represif, kaum lainnya yang lebih rendah.

Dengan kekuatan dan pengaruh yang besar inilah, kemudian dijadikan sebagai alat monopoli, untuk mencapai tujuan konglomerasi dan pengeksian supremasi, walau dengan penghalalan berbagai cara, termasuk di dalamnya dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi kelas sosial yang terpinggirkan. Tetapi terkadang, ketidakadilan perlakuan penguasa dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dan wajar oleh kaum pekerja, dan mereka menerimanya sebagai bagian dari takdir, serta tidak perlu memprotes, apalagi berkeinginan merubah sistem yang tengah berjalan. Ciri-ciri utama tatanan sosial feodal adalah akibat dari aturan Ilahi dan bukan sebagai hukuman atas ketidak taatan manusia (Fink, 2003: 24). dengan konsep berpikir yang demikian, membuat sistem seperti itu terlihat abadi, karena ikut dilegitimasi secara normatif oleh kaum pekerja, yang padahal sudah jelas adalah kaum yang paling dirugikan. Ini bisa terlihat dari minimnya pergolakkan arus bawah yang protes terhadap kebijakan sang penguasa.

Dengan akseptabelnya dogma takdir tersebut, membuat kewenangan sang penguasa (raja dan *lord*) bertambah besar, karena secara struktural telah mendapatkan pengakuan dari khalayaknya. Jadi apapun kebijakan yang ingin

dijalankannya, sangatlah kecil kemungkinan mendapatkan resistensi.

Karena merasa memiliki kekuasaan yang besar tersebut, sang penguasa dapat semena-mena dalam memperlakukan pekerjaannya, menuntut produktivitas yang bagus, intensitas yang tinggi, kinerja yang sempurna, kualitas yang maksimal, serta bekerja dengan disiplin yang tinggi. Tanpa memperdulikan dalam kondisi apa dan bagaimana mereka bekerja membanting tulang.

Juga tidak sedikit perlakuan yang kasar terhadap pekerja dengan cara kekerasan, penindasan, intimidasi, dan perampasan hak-hak hidup yang melekat. Padahal hal ini justru membuat lingkungan kerja menjadi tidak kondusif dan akan berimplikasi pada kualitas pekerjaan, sementara yang dituntut pada mereka agar dapat memberikan yang terbaik buat sang majikan.

Spektrum permasalahan-permasalahan seperti inilah yang menjadikan periode feodalisme sebagai kurun penjarahan dan penistaan hak individu manusia oleh manusia.

### **Pandangan Pragmatis Fase Hegemoni**

Rotasi pendominasian manusia terhadap manusia lainnya, ternyata mengalami perulangan pada masa ini, infleksi akan sebuah subsisten yang lebih bermartabat, sementara masih sebatas utopia. Setelah era feodalisme

berlalu, kemudian digantikan oleh hegemoni, atau lebih di kenal dengan sebutan Neo-Feodalisme. mengapa bisa disebut demikian? karena model dominasi di masa ini, banyak sekali mengadopsi karakteristik feodal.

Pertikaian antara yang kuat versus yang lemah masih menjadi ciri yang dominan, pendegradasian moralitas terus bertahan dengan ruang yang tidak hanya sebatas pada invasi anarkis, seperti agresi militer dari suatu negara kepada negara lainnya. Tetapi pula telah berekspansi secara persuasif pada ranah intelektual, ketika kapabilitas berdiplomasi dijadikan sebagai tameng pembenaran tentang dominasi.

Kemampuan intelektual merupakan media organis yang cukup ampuh dalam mengkooptasi sub-sub, yang tidak hanya sebatas pada kelompok masyarakat saja, tetapi juga pada sebuah negara. Misalnya saja sebuah negara yang memiliki kemampuan ekonomi dan politik yang kuat, bisa dengan mudahnya mengerosi aturan dan kebijakan negara lainnya demi melanggengkan kekuasaan sang mentor

Area politik dan perekonomian adalah sasaran yang empuk dan paling dituju dalam proses dominasi, karena ruang ini merupakan komponen krusial dalam keberlangsungan pemerintahan sebuah negara, ketika sub-sub ini bisa disetir dan ditaklukkan, maka dengan sendirinya negara tersebut akan mudah dikuasai.

Sedikit contoh yang diulas diatas menghantarkan kita pada pendefinisian sederhana tentang hegemoni, bahwa kekuatan dominasi bisa hadir karena adanya kekuasaan dan juga alat kekuasaan.

Eksistensi hegemoni yang cukup mengemuka ini disamping didorong oleh berhasilnya penguasaan konstelasi sosio- politik, juga karena ikut diakseptasinya konsep tersebut oleh masyarakat awam yang diwujudkan dengan pembiaran, bahwa konsep tersebut merupakan bagian dari sebuah peradaban. Seluruh kompleks aktivitas praktis dan teoritis di mana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominasinya, tetapi juga berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai (Gramsci, 1971: 244).

Konsepsi ini bisa diterjemahkan bahwa, masyarakat punya andil besar dalam pelegalan hegemoni, ketidak berdayaan, dan penerimaan bahwa hegemoni merupakan kewajaran dalam sebuah peradaban, secara tidak langsung ikut mendukung pelestarian keberadaan hegemoni.

Masyarakat menjadi salah satu sistem yang terpenting dalam pembahasan mengenai hegemoni, karena sudut pandang target pendominasi tidak hanya berada pada dimensi vital seperti negara dan pemerintahan, tetapi lebih dari itu, masyarakat dilihat sebagai subyek utama pembangun sub-sub tersebut, yang ketika masyarakat berhasil

diakali, maka akan dengan mudahnya sub-sub lainnya bisa dirobuhkan.

### **Kohesi Feodalisme dan Hegemoni dalam Konsepsi Diferensial**

Setelah memahami setiap karakter peradaban ini, sepertinya kita perlu mereformulasi lagi atau setidaknya sedikit menyederhanakan disparitas perspektif feodalisme dan hegemoni, untuk kemudian mengidentifikasi dan mengkategorikan kedalam masing-masing lini, agar menghindari jebakan bias dikotomi terhadap penginterpretasian kedua konsep ini.

#### **Feodalisme**

Ciri yang melekat pada rezim ini:

- Sistem monarki yang berkuasa
- Pemodelan hirarki
- Pengkultusan penguasa
- Mitologi pendewaan penguasa sebagai sesuatu yang harus dihormati dan diagungkan
- Gap ekonomi yang cukup besar
- Eksplorasi dan pengurusan hasil-hasil pertanian oleh penguasa, sebagai mata pencaharian utama masyarakat
- Pembagian kelas sosial
- Perlakuan separatis penguasa terhadap kelas pekerjaanya
- Perampasan hak-hak individu manusia
- Penerimaan konsep pengobjekan, sebagai bentuk dedikasi dan loyalitas rakyat terhadap pemimpinnya

### Hegemoni

Ciri yang melekat pada rezim ini:

- Tidak adanya sistem monarki, karena model pemerintahan lebih kepada Negara berdaulat
- Tidak terciptanya kelas sosial
- Dimensi kekuasaan lebih kepada yang kuat terhadap yang lemah
- Ekspansivitas dominasi antar Negara
- Pemodelan dominasi kolektif (aliansi beberapa negara yang membentuk persekutuan untuk menekan negara lainnya)
- Kapabilitas ekonomi dan eskalasi sosio-politik menjadi alat dominasi
- Intelektualitas sebagai media dominasi
- Invasi militer
- Intervensi kebijakan melalui ranah diplomasi
- Pembusukkan ide dan praktik kotor standar ganda sebagai instrumen

Dari deskripsi identifikasi yang diejewantah, dapatlah dibedakan konsep feodalisme dan hegemoni berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan. Walaupun secara pengartikulasian berbeda satu dan lainnya, akan tetapi hakekatnya kedua konsep tersebut memiliki kemiripan dalam tujuannya, hanya saja zaman dan medianya yang berbeda.

### **Simpulan**

Feodalisme dan hegemoni merupakan fase pembangunan karakter (*character building*) pendominasian oleh manusia terhadap manusia lainnya. Kedua peradaban ini

sama-sama memposisikan manusia sebagai objek penderita, yang membedakannya hanyalah era, dan bentuk pemodelan dominasi.

Feodalisme lebih mencirikan gambaran sebuah peradaban yang terbelakang, sehingga mata pemanifestasian dominasi, hanya pada lingkup yang sederhana, dimana sub-sub yang menjadi sasaran adalah manusia dan lingkungannya. Manusia dieksploitasi sebagai pekerja kasar, sedangkan lingkungan dieksplorasi sebagai komoditas, yang profitnya di keruk untuk kepentingan penguasa.

Hegemoni sendiri hadir, setelah era feodalisme berlalu, tetapi fase ini merupakan perulangan sejarah pendominasian, yang bertransformasi dalam wujud yang berbeda. Di era hegemoni, bentuk caplok pendominasian jauh melebihi ruang yang pernah ada pada zaman feodalisme, ketika bentuk dan alat kekuasaan jauh lebih moderen dari zaman sebelumnya. Dimana media kekuasaan dibangun tidak hanya berada pada tataran kekerasan (*coercion*) tetapi melalui cara-cara yang menarik (*attract*), yang dengan kemampuan diplomasi persuasif, suatu negara dapat mengintervensi kebijakan dalam negeri, Negara lain.

Feodalisme dan hegemoni merupakan fakta sejarah, yang digagas pada konsepsi ideologi kepentingan dan kekuasaan. Sebagai sebuah ideologi kita harus berusaha menerimanya dengan bijak, sekalipun menohok akal sehat kita.

Adakah yang salah mengenai dua konsep peradaban ini? Bisakah kita diberikan pilihan untuk tidak menjadi bagian dari peradaban tersebut? Ataukah ini memang sebuah kebenaran yang harus dijalani? Rasanya kita tidak perlu memfalsifikasi dan memferivikasi kedua konsep peradaban tersebut, karena jelas kita telah dan tengah melewati peradaban, yang kita sebut sebagai era penistaan terhadap manusia. Pertanyaannya sekarang,

sampai kapankah kita akan menerima hal ini sebagai sebuah realitas peradaban yang harus dijalani? Tidakkah kita menginginkan menciptakan sebuah peradaban baru yang jauh lebih bermartabat? Yang bisa memposisikan manusia pada derajat sesungguhnya.

Sepertinya pertanyaan-pertanyaan tersebut belum akan menemukan jawabannya, entah sampai kapan.

### Referensi

- Fink, Hans.(2003). *Filsafat Sosial (Dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gramsci, Antonio.(1971). *Selections from Prison Notebooks*, edited and translated by Quentin Hoare and Geoffrey N Smith, London:Lawrence and Wishart.
- Sugiono, Muhadi.(2006). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta:Pustaka pelajar

ISSN 1979-5262



9 771979 526235

PELANGI ILMU